

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanaman sikap tanggung jawab sosial sangatlah penting dalam mengembangkan nilai moral yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Karena peserta didik yang terbiasa bertanggung jawab pada lingkungan sosial, dimasa yang akan datang diharapkan dapat bergaul, berkomitmen terhadap janji, memenuhi kewajiban yang dimiliki, taat terhadap peraturan, menghormati nilai dan norma sosial, aktif dalam kegiatan sosial, dan tidak terbawa dalam beberapa kasus pidana maupun perdata yang merugikan dirinya maupun lingkungan sosial sekelilingnya. Namun harapan tersebut kini kian berkurang dikarenakan beberapa kasus yang dilakukan oleh sebagian peserta didik yang mencerminkan sikap tidak bertanggung jawab sosial, beberapa kasus seperti dilansir oleh Sugiarto “Tawuran Pelajar, Clurit Siswa Hingga Tewas. Tiga orang Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Semarang Terancam 12 Tahun Penjara” (Tribunnews jum’at, 27 April 2018). Oleh Dewi Agustina “Seorang Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Tersangka Pengedar Sabu-sabu Ikut Ujian Nasional di Sekolahnya” (Tribunnews. Senin, 2 April 2018). Oleh Choirul Arifin “Modus Pinjam dengan Jaminan SIM, Pelajar SMA Depok Jadi Korban Pencurian Motor” (Tribunnews. Minggu, 14 Januari 2018).

Menanggapi beberapa kasus pelanggaran sosial dan moral yang terjadi di Indonesia seperti contoh kasus diatas, disebabkan oleh kurangnya kesadaran dalam pentingnya sikap bertanggung jawab sosial, sampai saat ini pemerintahpun telah mencoba beberapa solusi dalam menghadapi beragam permasalahan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satunya seperti pendidikan karakter yang baru lima tahun terakhir di angkat sebagai upaya mencetak dan memperbaiki kualitas moral bangsa bangsa.

Pendidikan karakter merupakan sebuah pembahasan yang berawal dari pendapat kementerian pendidikan dalam memperingati hari Pendidikan Nasional mulai tahun 2010 dan terus di kembangkan sampai saat ini tahun 2018. Sejak

tahun 2010 banyak ahli pendidikan, pengamat pendidikan, dan praktisi pendidikan mencoba menterjemahkan pendidikan karakter menurut versinya masing-masing. Karena permasalahan dalam dunia pendidikan selalu ada dalam sepanjang tahun dan belum terselesaikan secara menyeluruh di setiap permasalahan yang ditemukan. Lembaga pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi berlomba untuk menterjemahkan pendidikan karakter itu dalam lembaganya masing-masing.

Sekolah mencirikan pendidikan karakter dengan pendidikan budipekerti. Sedangkan perguruan tinggi melakukan kajian-kajian ilmiah dan mendalam tentang apa, mengapa, dan bagaimana pendidikan karakter dalam praksis pendidikan.

Praksis pendidikan yang paling di soroti ketika mulai disahkannya Kurikulum 2013 pada bulan juli 2013 dan terus dikembangkan adalah Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Pendidikan Agama Islam (PAI) mulai dari penetapan kompetensi inti yang diharapkan setiap mata pelajaran di suatu lembaga pendidikan haruslah memiliki *output* (hasil) yang mempunyai kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, kaya akan pengetahuan dan memiliki beragam keterampilan. Empat kompetensi inti tersebut di serahkan pada mata pelajaran Agama dan PPKn, atas dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki Undang-undang yang mengatur segala yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Salah satunya adalah Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal (3) memberikan perhatian khusus dalam membentuk kepribadian peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selain perangkat hukum dalam menjalankan sistem pendidikan diperlukan pula tenaga serta praksi pendidikan yang handal dan mumpuni dalam menjalankan amanat hukum tersebut, maka peran guru PPKn merupakan salah satu tonggak dalam membina dan mengawasi perkembangan sikap peserta didik terutama dalam sikap bertanggung jawab sosial baik untuk diri dan lingkungan sekitarnya.

Bedasarkan hasil pengamatan awal peneliti di Sekolah Menengah Atas (SMA) Pasundan 8 Bandung, peneliti melihat masih sangat perlunya bimbingan peserta didik oleh Guru PPKn begitupun bimbingan Konseling dan bantuan guru mata pelajaran lain dalam mengawasi serta mengevaluasi perkembangan sikap peserta didik.

Sebagaimana yang telah sampaikan, maka peneliti tertarik membuat sebuah penelitian yang berjudul penelitian “Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Sikap Tanggung Jawab Sosial Peserta Didik (Studi Deskriptif Kualitatif terhadap Penanaman Nilai Tanggung Jawab Peserta Didik Tahun Ajaran 2018 SMA Pasundan 8 Bandung)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan, maka peneliti melakukan pengamatan awal dan melihat bahwasannya di SMA Pasundan 8 Bandung masih memerlukan pengarahan dan pengawasan guru dalam mengembangkan sikap tanggung jawab sosial.

Adapun beberapa masalah yang peneliti identifikasi pada saat di lapangan yakni :

1. Penerapan sikap tanggung jawab sosial peserta didik SMA Pasundan 8 Bandung belum berjalan secara optimal serta tidak tersosialisasi dengan baik,
2. Tidak tersosialisasinya peraturan sekolah, dan pembahasan tanggung jawab social peserta didik secara berkala oleh guru bersama peserta didik baik yang tergabung dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) maupun tidak mengikuti OSIS,
3. Masih diperlukannya beberapa upaya dalam menanamkan dan menerapkan makna pentingnya sikap tanggung jawab sosial peserta didik dalam mengembangkan tanggung jawab sosial dikehidupan sehari-hari.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, agar pembahasan ini tidak menjadi permasalahan yang terlalu melebar maka perlu dibatasi penelitian

yang akan dilakukan yakni untuk mengetahui peranan guru PPKn dalam mengembangkan tanggung jawab sosial peserta didik SMA Pasundan 8 Bandung. Penulis merumuskan persoalan dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengetahuan dan sikap tanggung jawab sosial peserta didik di SMA Pasundan 8 ?
2. Bagaimana kesadaran tanggung jawab sosial peserta didik SMA Pasundan 8 Bandung kelas XI di lingkungan sekolah dan luar sekolah ?
3. Apa saja peran serta upaya sekolah dalam mengembangkan sikap bertanggung jawab sosial peserta didik di SMA Pasundan 8 Bandung ?
4. Apa saja peran serta upaya guru PPKn dalam mengembangkansikap tanggung jawab sosial di SMA Pasundan 8 Bandung ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan identifikasi masalah, maka peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengetahuan dan sikap tanggung jawab sosial peserta didik di SMA Pasundan 8 Bandung,
2. Mengetahui kesadaran tanggung jawab sosial peserta didik SMA Pasundan 8 Bandung kelas XI dilingkungan sekolah dan luar sekolah,
3. Mengetahui peran serta upaya sekolah dalam mengembangkan sikap bertanggung jawab sosial peserta didik di SMA Pasundan 8 Bandung,
4. Mengetahui peran serta upaya guru PPKn dalam mengembangkan sikap tanggung jawab sosial di SMA Pasundan 8 Bandung.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini dapat diperoleh beberapa informasi yang berguna bagi peneliti dan para pembaca. Manfaat yang diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dipelajari, sebagai acuan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

2. Manfaat Praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh siapapun dalam usaha menanamkan nilai-nilai tanggung jawab sosial di dalam dunia pendidikan terhadap peserta didik terutama untuk membantu mahasiswa para calon guru PPKn dan guru SMA lainnya

F. Definisi Operasional

Definisi operasional yang akan dijadikan landasan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Peran guru

Peran Guru adalah sebagai pendidik, pembimbing, mengarahkan, pelatih, penilai, dan pengevaluasi peserta didik pada lembaga pendidikan.

2. Tanggung jawab sosial

Tanggung jawab sosial adalah sikap mental yang harus dimiliki setiap peserta didik dalam menjawab dan memperhitungkan segala tindakan yang dilakukan, menyertakan upaya terbaik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta menghargai komitmen yang dibuatnya terhadap tugas atau kewajiban tersebut dalam suatu kelompok sosial masyarakat.

3. Peserta didik

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mendapatkan dan mengembangkan potensi diri melalui beragam proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, dan jenis pendidikan tertentu.

G. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi terdiri dari tiga bagian yakni pembuka skripsi, isi skripsi, dan lampiran-lampiran atau Bagian pembuka skripsi terdiri dari halaman sampul, halaman pengesahan, halaman moto dan persembahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, kata pengantar, ucapan terima kasih, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, serta daftar lampiran, penjelasan. Adapun bagian isi skripsi terdiri dari beberapa Bab. Bab I pendahuluan, Bab II kajian teori dan kerangka peikiran, Bab III metode penelitian, Bab IV penelitian dan pembahasan, dan Bab V simpulan serta saran.

1. Bab I Pendahuluan

Pendahuluan bermaksud mengantarkan pembaca ke dalam pembahasan suatu masalah. Esensi dari bagian pendahuluan adalah pernyataan tentang masalah penelitian. Sebuah penelitian diselenggarakan karena terdapat masalah yang perlu dikaji lebih mendalam. Masalah penelitian timbul karena terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dengan membaca pendahuluan, pembaca akan mendapat gambaran arah permasalahan dan pembahasan. Pendahuluan bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami pokok-pokok isi skripsi secara ilmiah. Bagian pendahuluan skripsi berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional.

2. Bab II Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran

Kajian teori berisi deskripsi teoritis yang memfokuskan kepada hasil kajian atas teori, konsep, kebijaksanaan, peraturan yang ditunjang hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan masalah penelitian. Melalui kajian teori peneliti merumuskan definisi konsep dan definisi operasional variabel. Kajian teori dilanjutkan dengan perumusan kerangka pemikiran yang menjelaskan keterkaitan dari variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian. Dengan demikian, kajian teori bukan hanya menyajikan teori yang ada, tetapi juga mengungkapkan alur pemikiran peneliti tentang masalah yang diteliti dan dipecahkan dengan ditopang atau dibangun oleh teori-teori, konsep, kebijaksanaan dan peraturan yang ada. Secara prinsip Bab II terdiri dari pokok bahasan kajian teori dan kaitannya dengan bidang yang dikaji dan Hasil-hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan variabel penelitian yang akan diteliti.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan secara sistematis dan terperinci langkah – langkah dan cara yang digunakan dalam menjawab permasalahan dan memperoleh kesimpulan. Bab ini terdiri dari metode penelitian , desain penelitian, subjek dan objek penelitian, rancangan pengumpulandata dan instrument penelitian, rancangan analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV terdiri dari dua hal utama yakni :

- 1) Temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan masalah penelitian.
- 2) Pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan dari bagian ini adalah uraian tentang data yang terkumpul, hasil pengolahan data, serta analisis terhadap kondisi hasil pengolahan data. Uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan data pada dasarnya merupakan jawaban terhadap rumusan masalah penelitiann yang dijelaskan secara rinci dan disertai dengan pembahasan berbentuk analisis hasil pemikiran peneliti.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan merupakan kondisi hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap tujuan penelitian. Oleh karena itu, pada bagian kesimpulan disajikan pemaknaan peneliti terhadap semua hasil penelitian dan analisis.

Saran merupakan rekomendasi yang ditunjukkan kepada para pembuat kebijakan, pengguna, atau kepada peneliti berikutnya tentang tindak lanjut ataupun masukan hasil penelitian. Saran ditulis setelah kesimpulan.

6. Lampiran-lampiran

Adapun lampiran adalah terdiri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan skripsi baik berupa data, berkas, instrumen, photo, surat pengantar, surat perizinan yang menyertai dalam pembuatan skripsi.